



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
3. NHK : **757654**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **4.935.600.000**

1. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 3.342 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 495.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.670 m2/350 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 990.000.000
4. Tanah Seluas 1.681 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 3.591 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 3.342 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
7. Tanah Seluas 4.095 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 655.200.000
8. Tanah Seluas 3.565 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 570.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **71.000.000**

1. MOBIL, MITSHUBISHI TRUCK Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **734.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	247.810.313
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.988.410.313
III. HUTANG	Rp.	427.299.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.561.110.513

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.